**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Illegal Secara Online Oleh
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru**

Oleh : Fitrah Zaki Amri

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R.,SH.,MH

Pembimbing II : Widia Edorita,SH.,MH

Alamat : Jl. Pepa No.71, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Sail, Pekanbaru

Email : Fitrahzaki9@gmail.com. Telepon : 088271941794

ABSTRACT

Online trading activity or what is called E-commerce is a transaction activity that uses electronic media as a means of connecting between business people and consumers, so that agreements or agreements that are created are through online. One example of items that are widely traded online is cosmetics. Cosmetic circulation is an activity or series of activities aimed at transferring hands, spreading cosmetics. So the right to circulate cosmetics is only certain people who already have a permit and criminal for those who distribute illegal cosmetics online without any permission based on Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health.

Violations of illegal cosmetics sales sold online occurred in the 2017-2019 time span in Riau Province as many as 39 cases, this proves that there is urgency about the circulation of illegal cosmetics that circulate online in Riau Provision. Information on the illegal distribution of illegal cosmetics without online marketing authorization is obtained from public reports and / or BPOM Pekanbaru conducts surveys directly by monitoring both online through cyber patrols with takedown links and offline (Stores / sellers' houses operate). In this case BPOM Pekanbaru has the authority to conduct a search, seizure, crime scene, summons, examination, arrest and detention. BPOM Pekanbaru conducts law enforcement in the enforcement of online cosmetic product distribution practices in Riau Province, by coordinating with the PPNS / Police Korwas, Attorney's Office, District Court, Health Office, Satpol PP.

The obstacle for the Pekanbaru Center for Drug and Food Control (BPOM) in enforcing criminal law against illegal cosmetics sellers without an online marketing permit is the lack of public awareness of the cosmetics content and the dangers to health, inadequate budgetary funds and inadequate human resources. . Efforts are being made to overcome obstacles in law enforcement of criminal acts against the sale of illegal cosmetics online without marketing authorization by the Pekanbaru Center for Drug and Food Control (BPOM) Pekanbaru is to optimize Law Enforcement, Strengthen and improve synergy through cooperation with stakeholders or other criminal justice systems, Collaborating with IdEA (Indonesian E-Commerce Association), Collaborating with cargo transportation services, Collaborating with the Ministry of Communication and Information and Socialization and counseling to the public

Keywords: Cosmetics, Online, Illegal, Without Circular Permit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perdagangan secara online melalui media internet sudah sedemikian pesatnya di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat. Beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan transaksi online sebagai salah satu “tempat berbelanja” baru selain pusat perbelanjaan.

Kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalah pahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu contoh barang yang banyak diperjual belikan secara online adalah kosmetik. Produk kosmetik sangat di perlukan oleh beberapa konsumen baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai.¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/PERNII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika di sebutkan bahwa kosmetik digunakan untuk melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik bahwa semua kosmetik yang beredar di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BBPOM, selain melanggar Pasal 2 huruf c, peredaran kosmetik ini juga melanggar Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala BPOM Tentang Kosmetik, dimana pada pasal 10 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM. Peraturan peredaran sediaan farmasi diatur dalam Pasal 106 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹ Joshinta Djajadisastra, *Buku Pegangan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007, hlm.3

Konsumen berhak mendapatkan informasi dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan, tetapi banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.² Sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menggunakan media elektronik dalam sistem online wajib memberikan informasi yang lengkap, hal ini juga diatur secara jelas didalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam pengawasan obat dan makanan, beserta kosmetik diseluruh wilayah provinsi Riau. Dalam memberikan perlindungan hukum, kepada konsumen atas resiko yang berdampak pada kesehatan. Akibat penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu.

Pelanggaran penjualan kosmetik *illegal* yang di jual secara online terjadi dalam rentang waktu 2017-2019 di Provinsi Riau terdapat sebanyak 39 kasus³, hal ini membuktikan bahwa adanya urgensi tentang peredaran kosmetik *illegal* yang beredar

² Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 2 Febuari 2014, hlm. 5.

³Berdasarkan Wawancara Dengan Veramika Ginting, S.SI, APT, MH, PPNS BPOM Pekanbaru, 14 April 2020 Jam 14.30 WIB

secara online di Provinsi Riau. Info peredaran kosmetik *illegal* secara online di Provinsi Riau di dapatkan dari laporan masyarakat dan survei langsung PPNS BPOM baik secara online maupun offline.⁴ Dalam hal ini BPOM Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melakukan pengeledahan, penyitaan, olah tkp, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan dan penahanan. BPOM Pekanbaru melakukan penegakan hukum dalam penindakan praktik distribusi product kosmetik *illegal* secara online di Provinsi Riau, dengan melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS/Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dinkes, Satpol PP.⁵

BPOM Pekanbaru selama ini melakukan kerjasama dengan jasa angkutan cargo dan stakeholden, lainnya. BPOM jugak telah membuat MOU dengan idEA (Indonesia *E-commerce Association*) dan Asperindo. (asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik. Bukalapak, Tokopedia, Grab, Shopee, BNN, POLRI, BIN, dan Bea Cukai. Selain itu BPOM Pekanbaru melakukan pengawasan melalui Patroly Siber dengan TAKEDOWN LINK dan melakukan pencegahan dengan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Sebagai langkah anti sipasi atas peredaran obat obat dan makanan di Provinsi Riau.⁶

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengedaran kosmetik tanpa izin. Balai POM Pekanbaru belum sepenuhnya mengawasi pengedaran keseluruhan iklan kosmetik di Provinsi Riau, dikarenakan kurangnya SDM (sumber daya manusia),⁷ terbukti dengan iklan penjualan

produk kosmetik yang beredar di media online yang menjual produk yang tidak ada izin edarnya. Kosmetik tersebut bisa mudah didapat melalui Online Shop menggunakan Media online dengan memanfaatkan aplikasi tertentu untuk mengedarkannya, contoh : Bukalapak, Shope, Tokopedia ,Instagram, facebook, Lazada. Penjual kosmetik *illegal* tersebut sebagian berasal dan berdomisili di Provinsi Riau. Pengiriman barang tersebut dengan mudah di ketahui kota penjualnya karena tercantum nama daerah pada nama online shop yang di gunakan, misalnya @kosmetikca**ikpekanbaru, Jika melalui aplikasi khusus online shop dengan jelas di profil disebutkan asal daerah atau kota online shop tersebut.

Peredaran kosmetik merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindah tangankan, menyebar luaskan kosmetika. Jadi yang berhak melakukan peredaran kosmetik hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan kosmetik *illegal* secara online tanpa adanya izin berdasarkan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan telah melakukan tindak pidana, ancamanya berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul : ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Illegal Secara Online Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku penjualan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Op.Cit*

⁶ *Ibid*

⁷ *Op.Cit, wawancara*

kosmetik *illegal* secara online oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru ?

2. Apakah yang menjadi kendala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dalam penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik *illegal* secara online?

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap penjualan kosmetik *illegal* secara online oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik *illegal* secara online oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui kendala pemicu maraknya penjualan kosmetik *illegal* secara online di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjualan kosmetik *illegal* secara online.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku penjualan kosmetik *illegal* secara online oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan kedamaian perdamaian hidup.⁸ Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan antara manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.⁹

Penegakan hukum terhadap pelaku Penjualan Kosmetik *Illegal* yang diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 ditandai dengan ancamannya berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).

2. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Istilah "*criminal justice system*" atau system peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.¹⁰ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹¹

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 5.

⁹ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.2.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm.15.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.¹² Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.¹³ Prosedur yang di atur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.¹⁴

KUHAP menetapkan Penyidik Polri sebagai koordinator Penyidikan, namun dalam perkembangan Undang-Undang Pidana Khusus terdapat Penyidik PPNS, Penyidik TNI AL, Penyidik KPK, Penyidik BNN dan penyidik Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90

¹³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 145.

¹⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 3.

¹⁵ Mukhlis R, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni 2018, hlm. 47

E. Kerangka Konseptual

1. **Penegakan Hukum** adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang di langgar itu agar di tegakkan kembali.¹⁶
2. **Kosmetik** adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁷
3. **Illegal** adalah tidak legal/ tidak menurut hukum/ tidak sah.¹⁸
4. **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁹
5. **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006. Hlm. 115.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745

¹⁸ <https://kbbi.web.id/illegal> , diakses , 1 Agustus 2019.

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru Jalan Diponegoro Nomor 10 Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.²¹ Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru yaitu:

- 1) Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Besar Obat dan Makanan Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel adalah himpunan bagian dari populasi untuk mempermudah penelitian dalam menentukan pilihan.²² Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

NO.	Populasi	Jumlah	Sampel	Persentasi
1.	Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru	1	1	100%
2.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar	3	1	33%

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm. 51.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 95.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

	Pengawas Besar Obat dan Makanan Pekanbaru			
3	Konsumen Kosmetik online Tanpa Izin Edar BBPOM	10	6	60%
Jumlah		14	8	

Sumber : Data oleh BBPOM Pekanbaru Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

- a) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.
- f) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Pasal 341 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

g) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang di edarkan secara daring.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,²³ yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat. Wawancara juga dilakukan dengan Konsumen Kosmetik *Illegal* tanpa Izin Edar yang beroperasi di Pekanbaru.

b. Data Kuisioner

Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dengan daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabanya.²⁴

c. Kajian Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari kepustakaan, meliputi data yang ada

pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²⁵

Dalam menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik *illegal* secara online oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.

Produk - produk kosmetik yang ada dipasar Indonesia khususnya bagi daerah Pekanbaru juga banyak menjual kosmetik secara online yang tidak memiliki izin edar dari BPOM (Balai Besar Obat dan Makanan) Pekanbaru. Dengan harga yang lebih murah dibanding dengan produk aslinya inilah yang membuat masyarakat baik pria maupun wanita menjadi tergiur untuk membelinya.

Pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan secara daring dilaksanakan

²³ Burhan Ashashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rinwka Cipta, 2010, hlm.95

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.95

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

melalui pemeriksaan oleh Pengawas.²⁶ BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk.²⁷

Dampak yang dirasakan konsumen setelah memakai produk kosmetik *illegal* yaitu adanya keluhan seperti alergi, iritasi, dan bentol-bentol.²⁸ Pada kasus kosmetik *illegal*, zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetika diantaranya merkuri, rhodamin b, hidrokinon dan asam retinoat.²⁹ Berbahaya diatur secara khusus dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Dari data BPOM produk impor menguasai sektor kosmetik hampir 60 persen. Selama periode 2013-2014, kosmetik impor menunjukkan peningkatan dominasi pangsa pasar sedangkan kosmetik domestik mengalami penurunan. Selama pengawasan rutin Badan POM diseluruh Indonesia hingga tahun 2015 telah terjadi 35 persen pelanggaran pada produksi maupun peredaran kosmetik. Hal ini sebagai pemicu banyaknya kosmetik-kosmetik palsu yang beredar di masyarakat.

Kota Pekanbaru adalah Salah satu daerah yang marak ditemukannya penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Di beberapa akun media sosial yang diketahui berasal dari kota pekanbaru berdasarkan keterangan biografi yang

dicantumkan menjual kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM. Maraknya peredaran kosmetik *illegal* tanpa izin edar yang bebas diperjual belikan secara online mengarahkan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Pekanbaru sesuai dengan wewenang yang diatur dalam pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya laporan serta keterangan tindak pidana dibidang Kesehatan.

Pada 2017 terdapat 8 kasus, pada tahun 2018 terdapat 12 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 19 kasus. Adapun jumlah perkara tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* tanpa izin edar secara online yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Pekanbaru dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kasus. Dari 39 (tiga puluh sembilan) kasus sebagian sudah selesai dan Sebagian sedang berjalan proses penyelidikannya.

B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik *illegal* secara online oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.

1. Lemahnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat di Kota Pekanbaru dalam pemilihan produk kosmetik yang diperjual belikan secara online berdasarkan observasi masih kurang, masih banyaknya pembeli kosmetik yang tidak mengecek apakah produk tersebut memiliki izin edar ataupun tidak. Minimnya pengetahuan terhadap komposisi kosmetik hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya jual beli kosmetika *illegal* yang dijualbelikan secara bebas di media internet, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap adanya penjualan kosmetik secara *illegal* kepada BBPOM Pekanbaru sehingga

²⁶ Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000, hlm. 29.

²⁸ Ahmad Miru, *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya*, PT Rajawali Pers. Jakarta, 2004, hlm.19.

²⁹ Sumiaty Haslinda, *Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya*, dikutip dari <http://www.pom.go.id>, diakses pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 10.26 WIB

mengharuskan penyidik untuk berperan lebih aktif untuk mengungkap penyebaran kosmetik *illegal* di Provinsi Riau khususnya di Pekanbaru yang paling marak menjual produk kosmetika di internet.

Seorang Narasumber bernama Yosi Pengguna Kosmetik HN selama kurun waktu 3 tahun yang bertempat tinggal di Panam menyatakan telah rutin membeli kosmetik HN yang dibelinya melalui aplikasi Instagram, Yosi membeli produk melalui aplikasi Instagram dikarenakan harga yang lebih terjangkau dibanding membeli produk klinik kecantikan dan akses yang mudah untuk mendapatkannya karena berada di satu kota. tanpa mengetahui apakah produk tersebut memiliki izin edar dan memiliki kandungan yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh BPOM. Karena dirasa selama 3 tahun ini produk kosmetik yang dia gunakan memberikan kecantikan yang dia inginkan.³⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Provinsi Riau terkait kosmetik *illegal* jarang dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Suci dari pemilik online shop yang menjual kosmetik tanpa izin edar, ibu Suci menyatakan BBPOM Pekanbaru tidak melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk mengedukasi dan memberikan informasi terkait kosmetik *illegal* yang dijual nya.³¹ Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap penjual kosmetik *illegal* secara online dan pembeli kosmetik *illegal* secara online masih kurang dan tidak menyeluruh. BBPOM perlu lebih giat lagi untuk

³⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Yosi selaku pengguna kosmetik HN selama kurun waktu 3 tahun, bertempat di Panam pada tanggal 6 April 2020 pada pukul 17.00

³¹ Berdasarkan Wawancara dengan Suci Penjual Kosmetik *illegal* atau tanpa izin edar di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bertempat di jalan kartini, pada pukul 14.00

mensosialisasikan dan mengedukasi atas bahaya kosmetik *illegal* yang diperjualbelikan secara bebas di media massa dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran atas bahaya dan komposisi terhadap kosmetik yang digunakannya guna menjaga kesehatan tubuh. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosialisasi secara langsung ataupun melakukan sosialisasi melalui media massa.

2. Dana anggaran kurang memadai

Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh BBPOM Pekanbaru yang melingkupi satu Provinsi Riau dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan dengan jarak tempuh yang jauh untuk menangani kasus-kasus yang ada baik berdasarkan laporan masyarakat ataupun investigasi langsung yang tidak menutup kemungkinan membutuhkan dana yang besar.

Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara setiap tahun mengalami peningkatan. Namun peningkatan anggaran tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang akan dilaksanakan. Anggaran dasar BBPOM Pekanbaru yang telah ditetapkan dan disediakan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan masih belum cukup untuk mengcover keseluruhan biaya dalam upaya pengawasan terhadap peredaran kosmetik *illegal* secara online yang beredar di masyarakat.³²

Berdasarkan penjelasan dari BBPOM Pekanbaru biaya yang digunakan untuk satu kasus itu bervariasi. Biaya yang digunakan meliputi berbagai macam biaya yang dimulai dari biaya penyelidikan, biaya penangkapan/penindakan hingga biaya pemberkasan. Sebagai contoh ada beberapa kasus yang proses penyelidikannya

³² Berdasarkan Wawancara Dengan Veramika Ginting, S.SI, APT, MH, PPNS BPOM Pekanbaru, 14 April 2020 Jam 14.30 WIB

memerlukan biaya lebih dari prosesnya.³³ Ada proses pemberkasan yang memerlukan saksi ahli dan kuasa hukum negara yang dibayarkan dari anggaran BBPOM Pekanbaru. Sehingga sulit untuk menentukan berapa idealnya biaya yang diperlukan karena bervariasinya kasus yang dikerjakan. Data bersifat angka bersifat rahasia negara apalagi masih dalam proses.³⁴

3. SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memadai

Semakin banyak permintaan terhadap kosmetik *illegal* seiring dengan kemajuan teknologi yang ada maka peredaran yang terjadi juga semakin meningkat. Berdasarkan wawancara dengan PPNS BBPOM di Pekanbaru sulit melakukan pengawasan terhadap penyebaran kosmetik *illegal* di Provinsi Riau terkhususnya di kota Pekanbaru dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Penyidik BBPOM di Pekanbaru hanya terdiri dari 3 Penyidik Pegawai di bidang pemeriksaan dan penyidikan antara lain Veramika Ginting, S.SI, Apt, MH, Fitri Yuliani, S.Farm. Apt dan Detri Driani, SH. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh bidang pemeriksaan masih sangat terbatas. Setiap Penyidik menangani setiap kasus yang berbeda-beda.³⁵

Provinsi Riau yang memiliki 12 kabupaten dan 150 kecamatan tentu BBPOM Provinsi Riau harus mengawasi penyebaran kosmetik *illegal* yang diperjual belikan secara online dengan harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Dengan Jumlah Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Pekanbaru yang hanya berjumlah 3 orang yang tidak

hanya bertindak mengawasi peredaran kosmetik online maupun offline, terlebih tidak hanya bertindak melakukan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan di Kota Pekanbaru akan tetapi turut bertindak pula terhadap pengawasan penyidikan dan penyelidikan semua produk yang beredar di Provinsi Riau baik berupa produk makanan, obat, kosmetika, dls.

Idealnya satu kasus dipegang oleh 3 (tiga) penyidik. Sedangkan saat ini penyidik aktif yang bertugas dibidang penindakan BBPOM Pekanbaru ada 3 orang yang mengerjakan beberapa kasus yang berjalan sekaligus. Baik itu kasus online ataupun offline baik itu kosmetika, obat, makanan, dan lainnya.³⁶

C. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dalam mengatasi kendala penyidikan penjualan kosmetik *illegal* secara online.

1. Kerjasama dengan penyidik Kepolisian

Optimalisasi kerja sama BPOM dengan aparat penegak hukum lainnya yang berwenang seperti pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar pelaku (pedang) kosmetik *illegal* tanpa izin edar secara online ini dapat diproses secara hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang tegas, bukan hanya sekedar pemberian sanksi teguran secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara nara dengan Veramika Ginting selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Pekanbaru bahwa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru di dalam mengatasi hambatan di dalam penegakan hukum terhadap pengedar kosmetika *illegal* secara online tidak memiliki izin adalah dengan

³³ Berdasarkan Wawancara Dengan Bagian Penindakan, PPNS BPOM Pekanbaru, 19 Agustus 2020 Jam 16.00 WIB

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Op.Cit*, Wawancara Dengan Veramika Ginting, S.SI, APT, MH

³⁶ Berdasarkan Wawancara Dengan Bagian Penindakan, PPNS BPOM Pekanbaru, 19 Agustus 2020 Jam 16.00 WIB

melakukan sosialisasi di masyarakat, melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya peredaran kosmetika yang tidak memiliki izin, melakukan penyitaan terhadap kosmetika *illegal* secara online yang tidak memiliki izin dan melakukan Kerjasama dengan aparat hukum lainnya.

2. Memperkuat dan meningkatkan sinergitas melalui kerjasama dengan *stakeholder* atau *criminal justice system* lainnya

Dibutuhkan Kerjasama dalam memperkuat dan meningkatkan sinergitas yang baik antar sesama penegak hukum. Untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inspres) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Instruksi Presiden (Inspres) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan.

BBPOM telah memotori sebuah pertemuan lintas sektor antar penegak hukum untuk membangun sebuah sinergitas dalam menghadapi kejahatan obat dan makanan di era revolusi industri 4.0. Kegiatan koordinasi lintas sektor ini berlangsung selama tiga hari dimulai dari tanggal 23 hingga 25 Oktober 2018.³⁷

Pengawasan Obat dan Makanan bukan hanya tanggung jawab BPOM tetapi ada kewajiban daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

³⁷ Sinergitas Lintas Sektor Jadi Kunci Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15004/Sinergitas-Lintas-Sektor-Jadi-Kunci-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Obat-dan-Makanan.html> diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pada pukul 10.00 WIB

Deputi Bidang Penindakan B BPOM memiliki unit khusus, yaitu *cyber patrol* untuk mengawasi secara rutin situs-situs yang bisa diidentifikasi menjual terkhususnya kosmetik *illegal* yang diperjual belikan secara online. Tim *Cyber Patrol* bekerja sama dengan tim dari Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan juga jasa pengiriman.

3. Melakukan Kerjasama dengan IdEA (*Indonesian E-Commerce Association*)

Peredaran obat dan makanan melalui media online/daring menjadi tren di masyarakat Indonesia. Seiring dengan maraknya peredaran tersebut, semakin banyak celah untuk beredarnya obat dan makanan yang membahayakan masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Badan POM menggelar acara ‘Pembahasan Kerja Sama Badan POM dengan Marketplace di Bidang Pengawasan Penjualan dan Iklan Obat dan Makanan melalui Daring pada tanggal 16 juli 2019 di Badan POM. Kegiatan ini setidaknya dihadiri 75 orang peserta yang berasal dari internal Badan POM, IdEA (*Indonesian E-Commerce Association*) dan para CEO Marketplace.³⁸

Badan POM menandatangani Kesepakatan Bersama dengan idea (*Indonesian E-Commerce Association*) dan marketplace antara lain BukaLapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klikdokter, dan Halodoc untuk bersama lakukan pengawasan terhadap peredaran, pengiriman, promosi dan iklan produk obat dan makanan yang diedarkan melalui e-commerce. Penandatanganan Kesepakatan

³⁸ Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, *Rangkul idEA dan CEO Marketplace, Badan POM Perkuat Pengawasan Penjualan dan Iklan Obat dan Makanan melalui Daring*, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16439/Rangkul-idEA-dan-CEO-Marketplace--Badan-POM-Perkuat-Pengawasan-Penjualan-dan-Iklan-Obat-dan-Makanan-melalui-Daring.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 20.00 WIB

Bersama ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggriono dan Plt. Sekretaris Utama Badan POM, Reri Indriani.³⁹ Badan POM telah melaksanakan Patroli Siber berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta *Asosiasi E-Commerce Indonesia* (idEA) untuk menelusuri dan mencegah meluasnya peredaran produk *illegal* melalui e-Commerce,” tambah Penny K. Lukito.⁴⁰

4. Melakukan Kerjasama dengan Jasa angkutan kargo

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerjasama dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan. MOU yang telah ditandatangani oleh Badan POM dan ASPERINDO pusat tentang Koordinasi dan Tukar Menukar Informasi Dalam Rangka Efektivitas Pengawasan Barang Kiriman Berupa Obat dan Makanan.

Dengan keterlibatan perusahaan jasa pengiriman yang tergabung di dalam ASPERINDO, diharapkan informasi mengenai produk-produk yang diduga dicurigai Tidak Memenuhi Ketentuan dapat dikoordinasikan dengan Balai POM di

³⁹ Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, *Kepala Badan POM: “Marketplace Merupakan Garda Terdepan untuk Awasi Keamanan Produk Obat dan Makanan di E-Commerce”*, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17075/Kepala-Badan-POM-Marketplace-Merupakan-Garda-Terdepan-untuk-Awasi-Keamanaan-Produk-Obat-dan-Makanan-di-E-Commerce---.html>

⁴⁰ Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, *Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Outlook 2020*, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17630/Refleksi-Akhir-Tahun-2019-dan-Outlook-2020.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 21.00 WIB

Pekanbaru guna dilakukan Tindak Lanjut. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Provinsi Riau telah menggelar rapat koordinasi penguatan pengawasan obat dan makanan, dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) di kantor BBPOM Pekanbaru.⁴¹

5. Melakukan Kerjasama dengan Kemkominfo

BPOM telah menandatangani MoU dengan Kemkominfo dalam pengawasan media online dan KPI Pusat dalam pengawasan media TV dan Radio sejak tahun 2015, Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan menyeru Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran situs yang mempromosikan serta menjual obat dan makanan *illegal* secara online berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.⁴² Jadi, pihak Kemenkominfo bekerja sama dengan BPOM untuk menutup situs dan menonaktifkan media sosial yang mengiklankan produk dengan tidak benar.

6. Sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat

Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai daftar jenis-jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengedukasi masyarakat akan bahaya mengenai penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta menginformasikan sanksi yang akan diterima oleh pedagang sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin ini. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan mulai dari tingkat sekolah hingga ke pelosok daerah, sehingga pedagang (penjual) kosmetika tanpa izin edar secara online dapat mengetahui mengenai bahaya dan sanksi yang akan diterimanya bila tetap

⁴¹ *Op.Cit, wawancara*

⁴² Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, jdih.pom.go.id, diakses pada 2 mei pukul 11.30

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku penjualan kosmetik *illegal* secara online oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru berdasarkan data BBPOM Pekanbaru menunjukkan bahwa kasus peredaran kosmetik *illegal* tanpa izin edar yang diperjual belikan secara online yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Pekanbaru dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kasus. Dari 39 (tiga puluh sembilan) kasus sebagian sudah selesai dan Sebagian sedang berjalan proses penyelidikannya.
2. Kendala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dalam penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik *illegal* tanpa izin edar secara online adalah Lemahnya Kesadaran Masyarakat atas kandungan kosmetika dan bahaya terhadap kesehatan, dana anggaran kurang memadai dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memadai.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap penjualan kosmetik *illegal* secara online tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru adalah mengoptimalkan Penegakan Hukum, Memperkuat dan meningkatkan sinergitas melalui kerjasama dengan stakeholder atau criminal justice system lainnya, Melakukan Kerjasama dengan IdEA (*Indonesian E-Commerce Association*), Melakukan Kerjasama dengan Jasa angkutan kargo, Melakukan Kerjasama dengan

Kemkominfo dan Sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat

B. Saran

1. Perlu memperluas jangkauan penyuluhan hukum dan penyuluhan bahaya kosmetik, baik secara langsung turun ke lapangan maupun melalui media sosial dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha, agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai kosmetik *illegal* yang terkandung zat berbahaya di kulit yang marak diperjual belikan secara bebas dengan memberikan tata cara pembelian kosmetik di *E-Comerce*. Penyuluhan dapat melalui *influencer* yang memiliki efek di media social/ *E-comerce*.
2. Pemerintah perlu khususnya PPNS BPOM dapat mengoptimalkan dalam penyidikan kasus perdagangan kosmetik *illegal* secara online dengan cara menambah jumlah personil dan meningkatkan kinerja PPNS BPOM Pekanbaru.
3. Sebaiknya Balai Besar POM di pekanbaru menambahkan jadwal, setidaknya sidak dilaksanakan sebulan sekali pada sebuah sarana distribusi kosmetik secara online, serta melakukan sidak ke seluruh sarana distribusi kosmetik yang berjenis daring.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ashshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Djajadisastra, Joshinta, 2007, *Buku Pegangan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Effendi Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmad, 2004, *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya*, PT Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nurmadjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- RE. Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Simons dalam Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2001 *Penelitian Hukum Normatif*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2002, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, P.Joko, 1999, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta .
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/ Kamus/Data**
- Data Daftar Produk Tangkapan Kosmetik *Illegal* yang di jual secara Online oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru.
- Laporan Tahunan Balai Besar BPOM Pekanbaru Tahun 2018
- Mukhlis R, 2018, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni.
- Mukhlis, R, 2012, *Pergeseran kedudukan dan tugas penyidik Polri dengan perkembangan delik-delik diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1.
- Setia Putra, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 2 .
- C. Peraturan Per Undang-Undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

Keputusan Kepala Badan POM RI No. 02001/I/SK/KBMPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Pasal 341 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

D. D.Website

<https://www.pom.go.id>

<https://www.perpusnas.go.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

[https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17075/Kepala-Badan-POM-Marketplace-Merupakan-Garda-Terdepan -untuk-Awasi-Keamanan-Produk-Obat-dan-Makanan-di-E-Commerce---.html](https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17075/Kepala-Badan-POM-Marketplace-Merupakan-Garda-Terdepan-untuk-Awasi-Keamanan-Produk-Obat-dan-Makanan-di-E-Commerce---.html)

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16439/Rangkul-idEA-dan-CEO-Marketplace--Badan-POM-Perkuat-Pengawasan-Penjualan-dan-Iklan-Obat-dan-Makanan-melalui-Daring.html>, diakses pada

tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 20.00 WIB
Sumiaty Haslinda, *Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya*, dikutip dari <http://www.pom.go.id>, diakses pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 10.26 WIB